

AMNESTY INTERNATIONAL

SIARAN PERS

AI Index: ASA 21/013/2004 (Umum)
News Service No: 71
13 April 2004

Tanggal Embargo: 13 April 2004 20:01 GMT

Indonesia/Timor-Leste: Keadilan untuk Timor-Leste: PBB Berlambat-lambat sementara para pelaku kejahatan bebas berkeliraran

Pernyataan bersama Amnesty International dan Judicial System Monitoring Program

Para pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan berat lainnya yang dilakukan di Timor-Leste tahun 1999 akan lolos dari pengadilan jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak bertindak guna memenuhi komitmennya untuk membuat mereka bertanggung-gugat, demikian pernyataan bersama yang dikeluarkan Amnesty International dan Judicial System Monitoring Program (Program Pemantauan Sistem Yudisial/JSMP)* dalam satu laporan yang dikeluarkan hari ini.

Dua proses terpisah dilakukan untuk menginvestigasi dan mengadili mereka yang dituduh melakukan pelanggaran berat atas hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional di Timor-Leste tahun 1999, akan tetapi satu di antaranya sudah terbukti penuh cacat secara mendasar dan satunya lagi kemungkinan tidak bisa menyelesaikan tugasnya.

Laporan *Keadilan bagi Timor-Leste: Langkah ke Depan*, memperinci masalah-masalah Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* yang sengaja didirikan di Indonesia itu. Laporan ini menyimpulkan bahwa masalah yang ada bersifat serius, dan hasil dari beberapa pengadilan yang diadakan sangatlah tidak memuaskan sehingga sebaiknya janganlah ada lagi *proceeding* (acara kerja pengadilan) lebih lanjut dilakukan di Indonesia sampai reformasi secara mendasar diterapkan. Sementara itu, jalan lainnya harus diambil oleh PBB untuk memastikan tidak adanya *impunity* (kejahatan tanpa sanksi hukum).

Laporan tersebut juga menilik proses kejahatan berat yang dilakukan secara paralel di Timor-Leste yang meskipun adanya sejumlah kemajuan baru-baru ini, tetap hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bisa berhasil menyidik secara penuh kejadian-kejadian tahun 1999 ataupun memeriksa di pengadilan mereka semua yang bertanggung jawab.

Pekerjaan Unit Kejahatan Berat dan Panel-panel Khusus di Timor-Leste dihambat oleh terbatasnya kapasitas, komitmen pemerintah Timor-Leste yang tidak jelas atas proses ini, dan, yang penting, penolakan Indonesia untuk bekerjasama. Lebih dari tiga perempat, atau 281 orang, dari 369 tersangka yang didakwa di Timor-Leste kini bebas berkeliraran di Indonesia. Sejauh ini Indonesia menolak mentransfer mereka untuk diadili di Timor-Leste.

“Pada tahun 1999, PBB dan pemerintah-permerintah mengemukakan keterkejutan mereka

atas tindak kekerasan di Timor-Leste, namun empat tahun kemudian ketertarikan untuk mendukung investigasi dan penuntutan sudah memudar. Terlebih lagi, Indonesia kelihatannya tidak banyak ditekan untuk bekerjasama,” kata Amnesty International dan JSMP.

Kedua organisasi ini mendesak Dewan Keamanan PBB untuk merealisasikan tuntutan mereka bagi keadilan dengan memperluas serta meningkatkan dukungannya bagi proses kejahatan berat di Timor-Leste dan dengan menjelajahi alternatif-alternatif efektif untuk Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* di Indonesia.

“Sementara PBB berlambat-lambat, mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan berat di Timor-Leste tetap bebas dan, dalam banyak kasus masih aktif dalam kemiliteran atau kepolisian. Oleh karenanya tidaklah mengherankan bahwa pola, jika tidak skalanya, tindak kekerasan yang terlihat terjadi di Timor-Leste sejak saat itu sudah diulangi pula di bagian lainnya di Indonesia.”

Sebagai langkah pertama, kedua organisasi ini menyerukan agar PBB untuk segera membentuk satu komite independen yang terdiri atas para pakar untuk mempelajari hambatan-hambatan teknis dan politis dalam mencapai keadilan bagi Timor-Leste. Komite ini harus memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB mengenai langkah lebih lanjut apa yang dibutuhkan guna menjamin bahwa investigasi serta pemeriksaan pengadilan yang efektif dan bisa dipercaya bisa dilangsungkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Di antara pilihan yang kini mesti secara serius dipertimbangkan adalah pembentukan pengadilan kriminal internasional sebagaimana direkomendasikan oleh komisi PBB sendiri yaitu Komisi Penyelidikan Internasional untuk Timor Timur (ICIET) di bulan Januari 2000.

Amnesty International dan JSMP juga menyerukan agar para pemerintahan mengambil tindakan-tindakan dengan menyediakan dukungan teknis dan finansial bagi Unit Kejahatan Berat dan Panel-panel Khusus di Timor-Leste. Para pemerintahan juga mesti bersiap-siap untuk menangkap dan mengekstradisi ke Timor-Leste orang-orang yang telah didakwa oleh Jaksa Agung Timor-Leste atau menghadapkan mereka ke pengadilan mereka sendiri.

Latar belakang

Pada tanggal 30 Agustus 1999, penduduk Republik Demokrasi Timor-Leste (dahulu dikenal sebagai Timor Timur) memilih untuk merdeka dari Indonesia dalam satu pemungutan suara yang dikelola oleh PBB. Dalam bulan-bulan sebelum dan segera sesudah pemberian suara, para milisi yang didukung oleh pasukan keamanan Indonesia meningkatkan kampanye sistematis berupa pembunuhan, tindak kekerasan dan intimidasi. Sekitar 1,400 orang, sebagian besar para pendukung kemerdekaan, diyakini terbunuh, dan sejumlah lainnya yang tidak diketahui menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk penyiksaan dan pemerkosaan. Lebih dari seperempat juta orang, atau sekitar 30 persen penduduk Timor-Leste, dideportasi secara paksa atau melarikan diri menyebrang perbatasan ke Timor Barat yang menjadi bagian Indonesia dimana sekitar 28,000 dari mereka masih tinggal di sana sampai saat ini.

ICIET, yang didirikan oleh PBB, menyimpulkan bahwa pelanggaran besar atas hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan telah terjadi, serta merekomendasikan pembentukan pengadilan kriminal internasional. Akan tetapi, Indonesia memberikan jaminannya pada awal tahun 2000 bahwa para tersangka akan dituntut melalui sistem pengadilan nasionalnya dan hal ini diterima oleh Sekjen PBB dan Dewan Keamanan.

Delapan belas orang diajukan ke pengadilan di Indonesia di satu Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* untuk Timor Timur. Enam orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara antara tiga dan 10 tahun. Keenam orang ini tetap bebas sekarang sambil menunggu hasil keputusan banding. Sejumlah dari mereka tetap aktif dalam kemiliteran atau kepolisian.

Sementara itu, satu proses paralel juga dibentuk pada tahun 2000 di Timor-Leste oleh Badan Administrasi Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET). Sampai saat ini, 81 dakwaan telah dikeluarkan terhadap 369 orang. Lima puluh lima dari dakwaan ini mengandung tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap 339 orang. Total 49 tertuduh sudah divonis oleh Panel-panel Khusus dan satu tertuduh dibebaskan.

Mandat bagi operasi penjaga keamanan dewasa ini di Timor-Leste, yaitu Misi Pendukung PBB di Timor Timur (UNMISET) akan berakhir pada bulan Mei 2004. Mandat ini kemungkinan akan diperpanjang dan akan tetap ada dukungan tapi secara terbatas bagi proses kejahatan berat, yang dipusatkan terutama pada pembelaan dan pengadilan. Kurangnya kapasitas untuk melakukan penyidikan berarti bahwa ratusan pembunuhan serta pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya tidak akan diinvestigasi.

*JSMP didirikan awal tahun 2001 di Dili, Timor-Leste. Organisasi ini melakukan pemantauan atas pengadilan-pengadilan serta memberikan analisa hukum dan laporan-laporan tematik yang ditujukan untuk ikut membangun serta memperkuat sistem peradilan Timor-Leste.

Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut hubungilah bagian pers Amnesty International di London, Inggris, dengan nomor telepon +44 20 7413 5566 atau kunjungilah situs internet <http://www.amnesty.org> atau JSMP di Dili, Timor-Leste, telepon (+670)(390)323 883 atau kunjungi situs internetnya <http://www.jsmp.minihub.org>

Salinan lengkap dari laporan *Keadilan bagi Timor-Leste: Langkah ke Depan* bisa didapatkan di: <http://news.amnesty.org/library/index/engasa210062004>

Dokumen untuk umum

Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut hubungilah bagian pers Amnesty International di London, Inggris, dengan nomor telepon +44 20 7413 5566

Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW. Situs internet:
<http://www.amnesty.org>

Untuk berita terbaru mengenai hak asasi manusia, lihatlah <http://news.amnesty.org>